

# Manajemen Risiko & Tata Kelola Perusahaan

Manajemen Risiko	61
Tata Kelola Perusahaan	65

# Manajemen Risiko

## Menyeimbangkan Hasil dengan Risiko



Danamon memanfaatkan Pendekatan Pengelolaan Risiko Korporasi dalam pengelolaan risikonya. Pendekatan ini mensyaratkan disiplin proses yang proaktif dan sistematis dengan mencakup semua aktivitas: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, serta Risiko Strategik dan Reputasi. Pendekatan ini memudahkan kami dalam pengelolaan risiko berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai yang sehat, yang mencakup strategi yang jelas, struktur Dewan yang tepat, serta komite-komite yang aktif dengan peran, tanggung jawab, wewenang serta pendelegasian yang sesuai. Kami percaya pengelolaan risiko merupakan tanggung jawab seluruh unit bisnis dan bukan hanya fungsi dari Pusat Pengelolaan Manajemen. Organisasi Pengelolaan Risiko berperan menetapkan kerangka pendekatan serta melakukan pengecekan yang berimbang dan pengawasan yang independen sejalan dengan standar internasional dan persyaratan Bank Indonesia.

### **Struktur Organisasi Pengelolaan Risiko**

Struktur organisasi Pengelolaan Risiko Danamon didasarkan pada prinsip integrasi dan independensi dibawah Direktorat Integrated Risk Management. Walaupun demikian, semua unit bisnis juga bertanggung jawab atas pengelolaan risiko masing-masing dalam batasan parameter yang telah ditentukan.

Pengawasan risiko di tingkat Dewan Komisaris dilaksanakan melalui Komite Pengawasan Risiko, yang terdiri dari beberapa anggota Dewan Komisaris, direktur Integrated Risk serta seluruh jajaran inti manajemen risiko. Melalui rapat sekali dalam sebulan, Komite Pemantau Risiko mengevaluasi konsistensi dan efektivitas kebijakan serta pelaksanaannya.

Di tingkat manajemen, tanggung jawab pengelolaan risiko berada di Komite Pengelolaan Risiko. Komite tersebut terdiri dari Presiden Direktur Danamon, para anggota manajemen, termasuk Direktur Integrated Risk sebagai Ketua, Direktur Hukum & Kepatuhan serta para eksekutif lain yang ditunjuk. Komite berfungsi sebagai forum utama dimana Danamon melaksanakan pengelolaan risikonya di seluruh bisnis dan anak-anak perusahaan.

Direktur Integrated Risk membawahi Divisi Integrated Risk, dan bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan pengelolaan risiko. Di bawah direktur Integrated Risk, terdapat tiga Grup Risiko yang terpisah satu sama lain sebagai berikut:

- Divisi Risiko Kredit
- Divisi Risiko Pasar dan Likuiditas, serta
- Grup Risiko Operasional & Business Continuity Planning.

Di kuartal ketiga tahun 2007, kami telah membentuk Komite Risiko Strategis dan Reputasi yang dipimpin oleh Operation Risk Head. Komite tersebut beranggotakan wakil-wakil dari risiko pasar & likuiditas, risiko kredit, kontrol keuangan, hukum & kepatuhan serta juga wakil dari anak-anak perusahaan.

Risiko hukum dan kepatuhan dikelola di bawah Direktur Hukum & Kepatuhan, yang melapor kepada Komite Risiko dan Komite Pengawasan Risiko.

Risiko anak perusahaan dikelola dalam kerangka yang sama dengan pengelolaan risiko Bank. Risk Head di anak-anak perusahaan ini direkrut dengan persetujuan bersama dari Direktur Integrated Risk yang juga bertanggung jawab pada fungsi Integrated Risk.

#### **Aktivitas Pengelolaan Risiko**

Sejalan dengan pedoman dari Bank Indonesia, Danamon mengimplementasikan pemantauan dan sistem pengawasan untuk kategori risiko sebagai berikut: risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, strategis, reputasi, hukum dan kepatuhan.

#### **Risiko Kredit**

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan dan prosedur yang telah ada, yang meliputi pengelolaan kriteria penerimaan kredit, persetujuan kredit, penetapan harga, dan pemantauan serta pengelolaan kredit dan portofolio.

Fungsi pengelolaan kredit dengan dua lini pelaporan memiliki keunggulan dari sudut pandang risiko yang terintegrasi dimana terdapat kejelasan pemisahan tanggung jawab antara manajemen yang memiliki wewenang pemberian kredit dan Direktorat Integrated Risk, yang secara independen melakukan evaluasi atas masing-masing kredit. Risiko anak perusahaan juga dikelola di dalam kerangka risiko yang sama.

Danamon juga telah membentuk Komite Kredit, yang bertanggung jawab dalam memberikan persetujuan pengajuan kredit dan kualitas standar penjaminan dalam bisnis perbankan. Anggota Komite memiliki wewenang dalam batasan tertentu, berdasarkan kemampuan dan pengalamannya. Komite Kredit bertanggung jawab memberikan persetujuan atas proposal kredit serta kualitas penjaminan.

Sistem Informasi Manajemen yang komprehensif juga tersedia guna mendeteksi secara dini setiap perkembangan yang kurang menguntungkan, sehingga memungkinkan pengambilan langkah-langkah untuk mengatasi memburuknya kualitas kredit ataupun mengurangi kerugian kredit.

Guna memperkuat proses persetujuan kredit internal Danamon bekerja sama dengan perusahaan pemeringkat kredit internasional yang terpercaya untuk membantu dalam menyempurnakan model pemeringkatan bagi segmen korporasi dan komersial. Hal ini memungkinkan kami untuk dapat melakukan estimasi kemungkinan gagal bayar *probability of default* (PD) berdasarkan obligor maupun fasilitas. Selain itu, secara internal kami sedang melakukan perhitungan PD untuk seluruh portofolio segmen mass dan ritel Danamon.

### **Risiko Pasar & Likuiditas**

**Risiko Pasar.** Krisis *sub-prime* kredit perumahan di Amerika Serikat di bulan Agustus 2007 serta kenaikan harga minyak telah memberikan dampak negatif bagi perekonomian global dan dapat juga berdampak bagi Indonesia, walaupun dalam skala yang lebih kecil. Obligasi Indonesia dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing juga merasakan dampaknya. Walaupun memiliki fundamental yang cukup kokoh, menurut pendapat kami, pengaruh bagi Indonesia dapat meningkat akibat konsekuensi di tingkat regional dan global. Setelah reaksi dari US Fed, pasar global mulai pulih sesaat di akhir tahun, walaupun pasar tetap harus menghadapi gejolak yang tinggi. Hal ini dipantau secara berkesinambungan di tingkat Manajemen Senior dan ALCO.

Fungsi Pengelolaan Risiko Pasar Danamon diimplementasikan berdasarkan praktik-praktik internasional yang berlaku, yang melingkupi seluruh bisnis dan kegiatan Bank dan anak-anak perusahaannya.

Kami mengadopsi sistem pembukuan tunggal terpusat yang meliputi semua jenis risiko pasar di Danamon, yang menyediakan sudut pandang bank secara menyeluruh atas risiko pasar. Setelah selesai melakukan perubahan signifikan pada kerangka pengelolaan risiko pasar Danamon di tahun 2006, unit Risiko Pasar terus menyempurnakan kerangka tersebut selama tahun 2007.

**Risiko Likuiditas dan Suku Bunga di Pembukuan Bank.** Pengelolaan risiko likuiditas yang baik merupakan faktor yang penting bagi semua bank komersial. Menyadari hal tersebut, Danamon telah mengimplementasikan mekanisme pelaporan risiko likuiditas secara harian. Pengujian juga dilaksanakan tiap bulan guna memastikan bahwa Danamon memiliki kapasitas yang dibutuhkan dalam menghadapi situasi tekanan likuiditas.

Setiap tahun, secara rinci kami juga melakukan *review* atas kondisi-kondisi yang mungkin terjadi atas aktiva yang belum jatuh tempo dan produk-produk liabilitas.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas Danamon melaksanakannya melalui Asset and Liability Committee (ALCO). Komite ini bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva Bank berdasarkan prinsip pengelolaan risiko yang hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ALCO juga bertanggung jawab atas proyeksi neraca

Danamon. Anggota ALCO diketuai oleh Direktur Utama dan terdiri dari CFO, Treasurers, Direktur Integrated Risk, Market Liquidity Risk Head serta para Bisnis Head. Rapat diselenggarakan setidaknya sekali dalam sebulan, atau lebih jika diperlukan.

Secara proaktif, manajemen telah melakukan kajian atas neraca Danamon guna meminimalkan dampak negatif dari perubahan siklus suku bunga tersebut. Untuk itu kami akan meningkatkan inisiatif pendanaan jangka panjang guna mengelola risiko likuiditas dan suku bunga.

### **Risiko Operasional**

Risiko operasional merupakan bagian melekat dalam aktivitas perbankan sehari-hari. Kami telah memiliki kerangka pengelolaan Risiko operasional yang sistematis guna memastikan identifikasi dan penanganan semua risiko operasional. Kerangka tersebut juga mencakup anak-anak perusahaan Danamon melalui penunjukan Senior Officer di tempat bersangkutan yang bertanggung jawab mengelola risiko operasional Danamon di anak-anak perusahaannya.

Kami mengoperasikan sistem *online Operational Risk Management System (ORMS)* yang secara otomatis melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pelaporan dari risiko operasional. ORMS saat ini sudah dioperasikan di sebagian besar cabang dan unit Danamon. Ekspansi lebih lanjut sedang dilaksanakan terhadap unit lain serta anak perusahaan.

Kami juga melanjutkan pencatatan tidak hanya kerugian operasional, tapi juga berbagai kejadian risiko dan kemungkinan kesalahan agar dapat mendefinisikan mekanisme pengelolaan preventif yang lebih konservatif. Evaluasi risiko, yang merupakan bagian dari proses identifikasi risiko untuk setiap produk dan aktivitas, terus dilakukan guna menghindari terjadinya kesalahan dan penyelewengan. Berbagai program pelatihan dan sosialisasi telah diselenggarakan guna membangun budaya risiko dan tingkat kesadaran akan risiko operasional yang seragam di seluruh jajaran Danamon.

Danamon juga melakukan *Risk-Control Self-Assessment (RCSA)* setiap kuartal untuk mengukur tingkat potensi risiko operasional dan kepatuhan setiap unit. Di tahun 2007, sebanyak 2.765 *Self Assessment Unit* ikut berpartisipasi dalam kegiatan *self assessment*, meningkat 23% dibandingkan jumlah unit yang berpartisipasi di tahun sebelumnya.

Di akhir tahun 2007, jumlah kerugian akibat risiko operasional berada di bawah Rp 2 miliar.

#### **Risiko Strategik dan Reputasi**

Pengelolaan risiko strategis mencakup setiap risiko yang diakibatkan oleh penetapan strategi serta implementasi yang kurang memadai, sedangkan pengelolaan risiko reputasi menangani hal-hal guna memelihara kepercayaan nasabah dan masyarakat.

Risiko-risiko di atas dikelola oleh Danamon melalui Komite Koordinasi Risiko Strategis dan Reputasi yang baru dibentuk dan dipimpin oleh Operation Risk Management Head. Komite mengawasi risiko strategis dan reputasi serta melaporkannya kepada Dewan Direksi Danamon dan Komite Risiko.

#### **Risiko Hukum dan Kepatuhan**

Risiko hukum yang diakibatkan oleh aspek penanganan hukum yang kurang memadai, sedangkan risiko kepatuhan muncul akibat kegagalan dalam mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Risiko hukum dikelola oleh Grup Hukum Danamon sedangkan risiko kepatuhan dikelola oleh Grup Kepatuhan. Hal-hal penting dan temuan atas kedua risiko tersebut dilaporkan kepada Dewan Direksi Danamon.

#### **Basel II**

Danamon secara aktif terlibat bersama Bank Indonesia di semua tingkat inisiatif Basel II melalui perwakilan di berbagai forum dari tingkat tertinggi hingga tingkat operasional.

Secara internal, kami membentuk Komite Koordinasi Basel dengan Market Liquidity Risk Head dan melibatkan para manajer risiko bisnis, Kontrol keuangan, Teknologi Informasi dan Grup Kepatuhan. Komite bertanggung jawab terhadap implementasi semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan memastikan kepatuhan terhadap semua ketentuan Basel II. Berdasarkan evaluasi kami, tidak ditemukan kesenjangan yang berarti terhadap pedoman Basel II Bank Indonesia.

#### **Pengelolaan Kesiambungan Usaha (*Business Continuity Management*)**

Berbagai kemajuan penting telah dicapai dalam meningkatkan kemampuan operasional Danamon ketika terjadi bencana. Pada tahun 2007, tiga Pusat Komando Regional di Jakarta, Surabaya dan Medan telah dibentuk untuk meningkatkan kemampuan kami dalam penanganan bencana. Kami juga telah menyelesaikan pembuatan Manual Business Continuity Danamon (BCM Manual) yang menguraikan filosofi, kebijakan serta pedoman rinci dan prosedur yang perlu dilaksanakan ketika terjadi bencana.

# Tata Kelola Perusahaan

## Melindungi *Stakeholder*

Dewan Komisaris dan Direksi meyakini bahwa komitmen pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal mendasar untuk mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan para *investor* serta untuk mencapai sasaran Danamon dengan cara yang berintegritas. Komitmen ini juga hal yang penting dalam meraih kepercayaan dari para karyawan, nasabah, pemasok, pihak regulator dan masyarakat luas.

### Aktivitas Utama Di Tahun 2007

Menggarisbawahi dedikasi kami dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, sepanjang tahun 2007 kami telah menyelesaikan beberapa inisiatif penting, diantaranya:

- Perluasan fungsi kepatuhan pada anak-anak perusahaan (Adira Finance, Adira Quantum dan Adira Insurance) serta mensosialisasikannya melalui sesi monitoring bulanan.
- Penyesuaian anggaran dasar Danamon agar sesuai dengan ketentuan Tata Kelola Perusahaan dari Bank Indonesia.
- Penunjukan Komisaris Independen sebagai ketua Komite-komite di bawah Dewan Komisaris seperti disyaratkan dalam ketentuan Tata Kelola Perusahaan dari Bank Indonesia.
- Pelatihan *Know Your Customer* (KYC) untuk karyawan baru dan lama. Di akhir 2007, sebanyak 13.615 karyawan telah mengikuti program pelatihan KYC.
- Lokakarya Tata Kelola Perusahaan tentang "Pelaksanaan Prinsip GCG dan Tantangannya", dengan nara sumber dari Bank Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia (dahulu PT Bursa Efek Jakarta) dan perusahaan lainnya dalam rangka kampanye peningkatan kesadaran Tata Kelola Perusahaan bagi karyawan Danamon.

### Prinsip-prinsip Tata Kelola di Danamon

Pelaksanaan tata kelola perusahaan di Danamon didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- **Keterbukaan:** pengungkapan informasi secara jelas, akurat dan tepat waktu.
- **Akuntabilitas:** kewajiban, tanggung jawab, dan peran yang jelas antara komisaris, direktur dan pemegang saham bank.
- **Tanggung jawab:** kepatuhan terhadap semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan komitmen untuk bertindak sebagai anggota masyarakat yang baik di tengah masyarakat.
- **Independensi:** obyektivitas anggota Komisaris dan Direksi dalam segala hal, termasuk penilaian independen terkait dengan hal-hal yang melibatkan potensi benturan kepentingan.
- **Keadilan:** profesionalisme dan integritas dalam pengambilan keputusan untuk menjamin perlakuan yang adil dan setara guna melindungi kepentingan pemegang saham.
- **Integritas:** kejujuran yang menjadi dasar perilaku yang menjamin proses pengambilan keputusan yang bebas dari benturan kepentingan dan meletakkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi.

### Pedoman Perilaku

Sebagai bagian dari komitmennya pada praktek tata kelola yang baik, Danamon telah menerbitkan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). Pedoman Perilaku Bank Danamon diterapkan kepada Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan tanpa kecuali. Pedoman ini berfungsi sebagai landasan perilaku bagi semua karyawan untuk memastikan hubungan antara karyawan, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berjalan berdasarkan standar etika tertinggi dan bebas dari benturan kepentingan. Semua karyawan harus menandatangani, yang berarti menerima dan memahami isi Pedoman Perilaku ini serta akan melaksanakannya setiap tahun. Pedoman Perilaku ini didukung oleh berbagai pelatihan dan dievaluasi secara periodik serta disetujui oleh Komisaris dan Direksi.

Berbagai fasilitas disediakan untuk memastikan terselenggarakannya seluruh aktivitas berdasarkan standar etika tertinggi:

- Saluran rahasia, yang juga dikenal dengan program *whistleblower* disediakan bagi seluruh karyawan untuk melaporkan kecurigaan terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku atau kasus penipuan atau korupsi. Adanya saluran tersebut disosialisasikan melalui situs internet internal, poster dan pelatihan.
- Pernyataan Perilaku Perusahaan (*Statement of Conduct*) termasuk dalam semua kontrak yang ditandatangani dengan para pemasok. Saluran rahasia disediakan untuk melaporkan pelanggaran Pedoman Perilaku oleh pemasok.

### **Struktur Tata Kelola**

#### **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Melalui RUPS, para pemegang saham memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta menyetujui remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Undangan dan agenda untuk menghadiri RUPS selalu disebarluaskan sebelumnya kepada para pemegang saham. Persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham diperlukan untuk setiap perubahan material yang mempengaruhi ekuitas, kepentingan ekonomi atau hak kepemilikan saham dari pemegang saham yang ada. Di tahun 2007, Danamon menyelenggarakan satu kali RUPS Tahunan (RUPST) dan satu kali RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

RUPST tanggal 27 Maret 2007 memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi dan laporan keuangan Danamon untuk tahun buku 2006. Rapat juga memberikan persetujuan atas pembayaran dividen sebesar Rp 663 miliar atau Rp 131,439 per saham, atau sekitar 50% dari laba bersih konsolidasi setelah pajak tahun buku 2006.

Selain agenda di atas, rapat juga menyetujui pembebasan (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk pengelolaan dan supervisi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006. Di hari yang sama, Danamon juga melaksanakan RUPSLB, yang memberikan persetujuan atas penambahan dan penetapan ulang seluruh Anggaran Dasar Danamon.

### **Dewan Komisaris**

#### **Tugas-tugas dan Komposisi**

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja bank dibandingkan dengan strategi dan sasaran yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan atas pengelolaan risiko bank, serta juga pengawasan atas audit eksternal dan internal serta temuannya, serta memastikan pengungkapan informasi yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris mewakili kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab pada RUPS.

Dewan Komisaris terdiri dari tujuh anggota, termasuk Komisaris Utama, di mana seluruh anggota merupakan profesional yang kompeten dengan pengalaman luas serta keahlian yang beragam, diantaranya di bidang pengelolaan risiko.

Sesuai dengan ketentuan Bapepam, peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 dan peraturan Bursa Efek Jakarta No. IA, Danamon telah menunjuk empat Komisaris Independen yang mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.

### **Direksi**

#### **Tugas-tugas dan Komposisi**

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan bank sehari-hari, termasuk formulasi dan eksekusi rencana bisnis, anggaran tahunan dan kebijakan, pemantauan dan pengelolaan risiko, pengelolaan aktiva, sumber daya dan reputasi bank, rekrutmen sumber daya manusia serta pembentukan dan operasi komite manajemen dalam pengelolaan bank sehari-hari.

Direksi terdiri atas tujuh Direktur per 31 Desember 2007, termasuk Presiden Direktur. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, satu direktur ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan dengan tanggung jawab memastikan kepatuhan secara tepat waktu dan akurat atas seluruh peraturan, ketentuan dan persyaratan badan regulator termasuk Bank Indonesia, Otoritas Pasar Modal dan Bursa Efek. Direktur Kepatuhan juga bertanggung jawab memastikan ditaatinya seluruh kebijakan dan prosedur internal.

## Komposisi Dewan Komisaris

Nama		Efektif Sebagai Anggota Sejak		Akhir Masa Jabatan
		Persetujuan Bank Indonesia	Rapat Umum Pemegang Saham	
Ng Kee Choe	Komisaris Utama	24 Mei 2006	22 Mei 2006	RUPS 2008
JB Kristiadi	Komisaris Independen	5 Desember 2005	9 Mei 2005	RUPS 2008
Gan Chee Yen	Komisaris	21 Oktober 2003	16 Juni 2003	RUPS 2008
Victor Liew Cheng San	Komisaris	21 Juli 2004	26 Maret 2004	RUPS 2008
Milan R Shuster	Komisaris Independen	5 Desember 2000	9 Oktober 2000	RUPS 2008
Harry A.S. Sukadis	Komisaris Independen	10 September 2003	16 Juni 2003	RUPS 2008
Manggi Taruna Habir	Komisaris Independen	22 Juli 2005	9 Mei 2005	RUPS 2008

Catatan: Lihat Bab Data Perusahaan untuk informasi biografis

## Komposisi Direksi

Nama		Efektif Sebagai Anggota Sejak		Akhir Masa Jabatan
		Persetujuan Bank Indonesia	Rapat Umum Pemegang Saham	
Sebastian Paredes	Direktur Utama	9 Mei 2005	9 Mei 2005	RUPS 2008
Jerry Ng*	Wakil Direktur Utama	8 September 2003	16 Juni 2003	RUPS 2008
Muliadi Rahardja	Direktur	21 Desember 1999	31 Agustus 1999	RUPS 2008
Anika Faisal	Direktur Kepatuhan	2 Agustus 2002	16 Mei 2002	RUPS 2008
Hendarin Sukarmadji	Direktur	4 Juli 2005	9 Mei 2005	RUPS 2008
Ali Yong	Direktur	8 Mei 2006	22 Mei 2006	RUPS 2008
Vera Eve Lim	Direktur	26 Juni 2006	22 Mei 2006	RUPS 2008
Sanjiv Malhotra	Direktur	26 Juli 2006	22 Mei 2006	RUPS 2008

\*) Jerry Ng telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Direktur Utama pada tanggal 10 September 2007 dan mulai efektif per tanggal 10 Oktober 2007

Catatan: Lihat Bab Data Perusahaan untuk informasi biografis

## Fit and Proper Test

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI 8/14/PBI/2006 setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Per 31 Desember 2007, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

## Program Pelatihan

Guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti berbagai program pelatihan dan pengembangan selama tahun 2007.

## 10 Program Pelatihan Utama

1. Penyebaran Manajemen Risiko
2. Manajemen Risiko Kredit Korporasi
3. Konferensi ke-15 Asean *Fed of Accountants*
4. *Private Banking International Wealth Management Summit*
5. Pelatihan Syariah
6. Konferensi *Sovereign Hotspots Asia 2007*
7. Membangun dan Memimpin Budaya Berkinerja Tinggi
8. *Workshop Sumber Daya Manusia 2007*
9. Pelatihan Serikat Kerja (*Labor Union*) NIBA
10. *International Positive Psychology Summit*

## Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Guna melaksanakan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan rapat gabungan Komisaris dan Direksi. Notulen dari setiap rapat ditulis dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi dan didistribusikan kepada para anggota serta para pengikut rapat serta anggota yang tidak dapat hadir. Pendapat yang bertentangan juga dicatat.



## Kehadiran Dalam Rapat BoC dan BoD

	Rapat BoC*	Rapat BoC/BoD	Rapat BoD**
	Kehadiran	Kehadiran	Kehadiran
Jumlah Rapat	30	7	27
<b>Dewan Komisaris</b>			
Ng Kee Choe	4	7	-
JB Kristiadi	6	7	-
Gan Chee Yen	2	5	-
Victor Liew Cheng San	24	7	-
Milan R. Shuster	28	7	-
Harry A.S. Sukadis	26	6	-
Manggi Taruna Habir	26	7	-
<b>Direksi</b>			
Sebastian Paredes	-	7	22
Jerry Ng	-	6	17
Muliadi Rahardja	-	7	21
Anika Faisal	-	7	16
Hendarin Sukarmadji	-	7	23
Ali Yong	-	6	25
Vera Eve Lim	-	7	22
Sanjiv Malhotra	-	5	19

\*) Termasuk Rapat Komite Audit, Pemantau Risiko, Nominasi dan Remunerasi, dan Tata Kelola Perusahaan

\*\*) Tidak termasuk Rapat Komite Direksi

## Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja Direksi secara keseluruhan dan secara individu berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan. Indikator ini merupakan kriteria finansial yang spesifik seperti target pendapatan dan biaya, jumlah nasabah, sumber daya manusia, termasuk target rekrutmen sumber daya yang kompeten, pelatihan (dalam jumlah hari dan materi), jumlah atrisi, moral dan keselarasan umum yang diukur dalam survei sumber daya manusia tahunan. Integritas proses dan perbaikannya juga dimonitor melalui

laporan audit dan kepatuhan. Selain evaluasi kinerja individu dan kelompok yang dilaksanakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam RUPST pemegang saham juga berhak untuk melakukan evaluasi kinerja berdasarkan laporan keuangan tahunan.

## Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Selama periode 2007, jumlah remunerasi yang dibayarkan dalam bentuk gaji dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

## Remunerasi Dewan Komisaris

Dalam Rupiah	2007	2006	2005
Gaji	7.455.420.558	9.140.431.956	9.074.492.577
Tunjangan	2.408.841.432	2.926.502.163	2.991.334.067
Tantiem	TBD*	7.800.000.000	10.500.000.000

## Remunerasi Direksi

Dalam Rupiah	2007	2006	2005
Gaji	20.249.824.946	24.051.214.617	18.061.266.557
Tunjangan	4.071.586.607	4.148.057.135	4.931.568.232
Tantiem	TBD*	28.329.791.620	35.505.079.815
Pemberian Long Term Compensation Plan/Opsi Saham	47.500.000.000	5.160.000**	15.950.000**

\* Akan ditentukan pada RUPS pada tanggal 3 April 2008

\*\* Lembar Saham

### Komite-komite di bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dibantu oleh empat Komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
4. Komite Tata Kelola Perusahaan

#### Komite Audit

Komite Audit memantau dan mengevaluasi rencana audit, penerapan, dan hasilnya. Komite ini bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan. Komite juga memastikan pelaksanaan rencana tindak lanjut dan temuan Audit Internal, akuntan publik, dan departemen supervisi BI, dan memastikan bahwa akuntan publik mematuhi standar akuntansi yang berlaku.

Menyangkut penunjukan akuntan publik, Komite Audit merekomendasikan akuntan kepada Komisaris dan rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk disetujui.

Per 31 Desember 2007, Komite Audit terdiri dari enam anggota termasuk Ketua Komite. Komposisi Komite Audit terdiri dari tiga Komisaris Independen dan dua anggota eksternal yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang audit. Di tahun 2007, Komite Audit menyelenggarakan 12 kali rapat.

#### Komposisi Komite Audit

Nama	Jabatan	Anggota Sejak
Milan R. Shuster	Ketua/Komisaris Independen	3 Oktober 2006
Victor Liew Cheng San	Anggota/Komisaris	3 Oktober 2006
Harry A.S. Sukadis	Anggota/Komisaris Independen	3 Oktober 2006
Manggi Taruna Habir	Anggota/Komisaris Independen	3 Oktober 2006
Setiawan Kriswanto	Anggota Eksternal	3 Oktober 2006
Hadi Indraprasta	Anggota Eksternal	3 Oktober 2006

Catatan: Lihat Bab Data Perusahaan untuk informasi biografis

### Penunjukan Auditor Eksternal

Komite Audit mensyaratkan auditor eksternal untuk menegaskan independensinya sesuai standar independensi yang disebarluaskan oleh badan otoritas dan profesional lokal maupun internasional.

Auditor Siddharta Siddharta & Widjaja ditunjuk sebagai akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan bank untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2007 dengan perkiraan biaya sebesar Rp 4,4 miliar termasuk PPN 10%. Auditor independen yang ditunjuk telah menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas auditnya.

#### Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengevaluasi konsistensi dan kesesuaian antara kebijakan pengelolaan risiko dan implementasinya serta pelaksanaan dari kebijakan di atas.

Di tahun 2007, Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan pengelolaan risiko Bank dan implementasinya. Sepanjang tahun, Komite juga telah memantau dan mengevaluasi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Komite Pengelolaan Risiko dan Unit Kerja Pengelolaan Risiko. Per 31 Desember 2007, Komite Pemantau Risiko terdiri dari enam anggota termasuk Ketua Komite. Sepanjang tahun, Komite menyelenggarakan 12 kali rapat.

#### Komposisi Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Anggota Sejak
Milan R. Shuster	Ketua/Komisaris Independen	3 Oktober 2006
Victor Liew Cheng San	Anggota/Komisaris	3 Oktober 2006
Harry A.S. Sukadis	Anggota/Komisaris Independen	3 Oktober 2006
Manggi Taruna Habir	Anggota/Komisaris Independen	3 Oktober 2006
Setiawan Kriswanto	Anggota Eksternal	3 Oktober 2006
Hadi Indraprasta	Anggota Eksternal	3 Oktober 2006

Catatan: Lihat Bab Data Perusahaan untuk informasi biografis

### Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite ini bertanggung jawab menominasikan kandidat yang tepat untuk posisi Direktur. Komite juga memfasilitasi penilaian yang cermat terhadap tugas-tugas manajerial Direksi, oleh karenanya Komite menetapkan kriteria yang jelas mengenai tingkat ketrampilan dan jumlah Direktur yang diperlukan serta mengawasi rencana suksesinya. Komite bertugas memastikan telah memadainya remunerasi yang diberikan dengan memperhatikan risiko keuangan, permintaan dan persyaratan dari setiap peran dan memonitor kebijakan remunerasi. Komite merekomendasikan program-program insentif yang sesuai, termasuk pembayaran bonus atau kepemilikan saham bank oleh Direksi, dan memastikan bahwa pengungkapan informasi kepada masyarakat telah memenuhi semua peraturan yang berlaku.

Di tahun 2007, Komite telah melakukan kajian atas kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan menyerahkan rekomendasinya kepada RUPS. Komite juga mengevaluasi kebijakan remunerasi Eksekutif Senior dan karyawan dan menyerahkan rekomendasinya kepada Direksi. Sehubungan dengan tugas tersebut, Komite telah menyiapkan prosedur nominasi untuk para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk diserahkan kepada RUPS.

Per 31 Desember 2007, Komite terdiri dari 4 anggota termasuk Ketua Komite dan menyelenggarakan rapat sebanyak 4 kali selama tahun 2007.

### Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Anggota Sejak
JB Kristiadi	Ketua/Komisaris Independen	16 Januari 2007
Ng Kee Choe	Anggota/Komisaris	16 Januari 2007
Milan R. Shuster	Anggota/Komisaris Independen	16 Januari 2007
Harry A.S. Sukadis	Anggota/Komisaris Independen	16 Januari 2007
Maria T. Kurniawati	Anggota Eksekutif	16 Januari 2007

Catatan: Lihat Bab Data Perusahaan untuk informasi biografis

### Komite Tata Kelola Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab utama Komite adalah memantau proses tata kelola Bank, termasuk memastikan keterbukaan dan transparansi serta keadilan akses informasi kepada seluruh pemegang saham. Komite juga melakukan kajian atas Pedoman Perilaku bagi para eksekutif, karyawan dan Direktur. Per 31 Desember 2007, Komite Tata Kelola Perusahaan terdiri dari tiga anggota termasuk ketua komite dan menyelenggarakan sebanyak dua kali rapat selama tahun 2007.

### Komposisi Komite Tata Kelola Perusahaan

Nama	Jabatan	Anggota Sejak
Manggi Taruna Habir	Ketua/Komisaris Independen	16 Januari 2007
Gan Chee Yen	Anggota/Komisaris	16 Januari 2007
JB Kristiadi	Anggota/Komisaris Independen	16 Januari 2007

Catatan: Lihat Bab Data Perusahaan untuk informasi biografis

### Ringkasan Kehadiran Dalam Rapat Tahun 2007

	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Nominasi dan Remunerasi	Komite Tata Kelola Perusahaan
	Kehadiran	Kehadiran	Kehadiran	Kehadiran
Jumlah Rapat	12	12	4	2
<b>Dewan Komisaris</b>				
Ng Kee Choe	-	-	4	-
JB Kristiadi	-	-	4	2
Gan Chee Yen	-	-	-	2
Victor Liew Cheng San	12	12	-	-
Milan R. Shuster	12	12	4	-
Harry A.S. Sukadis	11	12	4	-
Manggi Taruna Habir	12	12	-	2
<b>Anggota Eksternal</b>				
Setiawan Kriswanto	12	12	-	-
Hadi Indraprasta	12	12	-	-
Maria T. Kurniawati	-	-	3	-

Agenda dan topik dari Rapat Komite di bawah Dewan Komisaris selama tahun 2007:

### Agenda Rapat Komite Audit

Tanggal	Agenda Rutin	Topik Khusus
15 Januari 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian bulanan hasil Audit Internal (SKAI)</li> <li>Diskusi entitas dengan rating yang tidak memenuhi persyaratan oleh SKAI</li> <li>Kajian kasus-kasus <i>fraud</i></li> <li>Setelah penunjukan auditor eksternal baru, <i>update</i> bulanan dari hasil audit</li> <li>Hasil audit Asuransi Adira Dinamika</li> <li>Pemilihan dan penunjukan auditor eksternal, Siddharta Siddharta &amp; Widjaja</li> <li>Rencana tahunan Internal Audit 2008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Audit Asuransi Adira Dinamika</li> <li>Seleksi, keputusan dan penunjukan auditor eksternal, Siddharta Siddharta &amp; Widjaja</li> <li>Rencana tahunan Internal Audit 2008</li> </ul>
27 Februari 2007		
26 Maret 2007		
26 April 2007		
29 Mei 2007		
21 Juni 2007		
30 Juli 2007		
22 Agustus 2007		
27 September 2007		
30 Oktober 2007		
29 November 2007		
18 Desember 2007		

### Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Tanggal	Agenda Rutin	Topik Khusus
15 Januari 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transaksi pihak terkait</li> <li>Kepatuhan atas Peraturan</li> <li>Tresuri dan Pasar Modal</li> <li>Risiko Pasar dan Likuiditas</li> <li><i>Update</i> Portofolio dan <i>Integrated Risk</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bancassurance</i></li> <li><i>Update</i> Basel II</li> <li><i>Update</i> UKM/Komersial</li> <li>Adira Quantum</li> <li>Tagihan Adira</li> <li>Tagihan Kartu Kredit</li> <li>Profil UKM/Komersial</li> <li><i>Update</i> Proyek NCBS TI</li> <li>Tagihan PT Dharmapala Usaha Sukses (DUS)</li> <li>Target Pasar Korporasi</li> <li>Nasabah <i>Affluent</i></li> <li>Portofolio Kredit Perumahan</li> <li><i>Unsecured Personal Loans</i></li> <li><i>Update</i> Risiko Operasional</li> <li><i>Asset-Based Finance</i></li> <li><i>Update</i> Banjir di Jakarta</li> </ul>
27 Februari 2007		
26 Maret 2007		
26 April 2007		
29 Mei 2007		
21 Juni 2007		
30 Juli 2007		
22 Agustus 2007		
27 September 2007		
30 Oktober 2007		
29 November 2007		
18 Desember 2007		

### Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Tanggal	Agenda
16 Januari 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penunjukan ketua, anggota dan sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi</li> </ul>
26 Maret 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi</li> <li>Pengunduran diri Direktur Perbankan Korporasi</li> <li>Nominasi kandidat Corporate Banking Business Head</li> <li>Diskusi Tantiem dan gaji (Dewan Komisaris, Direksi, Board of Management/BoM)</li> <li>Diskusi proposal <i>Long Term Compensation Plan</i> (LTCP)</li> </ul>
21 Juni 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi sistem insentif Danamon</li> <li><i>Long Term Compensation Plan</i> (LTCP)</li> <li><i>Talent Management Model</i>, <i>Succession Planning</i> dan <i>Bench Strength Assessment</i></li> </ul>
23 Agustus 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proposal <i>Long Term Compensation Plan</i> untuk anggota Direksi dan BoM</li> </ul>
9 November 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi komposisi Dewan Komisaris sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia</li> <li>Penunjukan Ketua Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko</li> <li>Diskusi posisi-posisi anggota Direksi dan masa jabatannya</li> <li>Diskusi skema kompensasi dan insentif posisi manajemen senior kunci</li> <li>Pengunduran diri Wakil Presiden Direktur dan persetujuan pencarian Wakil Presiden Direktur baru</li> </ul>

### Agenda Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan

Tanggal	Agenda
18 Juni 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Review</i> kepatuhan Danamon dengan peraturan Tata Kelola Perusahaan Bank Indonesia</li> <li>Rencana Komite Tata Kelola Perusahaan 2007</li> </ul>
25 Oktober 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham 2008</li> <li>Usulan penyempurnaan pada pengungkapan dalam Laporan Tahunan 2007</li> </ul>

### **Komite-komite di bawah Direksi**

Direksi dibantu oleh beberapa komite eksekutif, masing-masing dengan tanggung jawab memberikan bantuan dan rekomendasi tentang hal tertentu sehubungan dengan tugas Direksi.

**Komite Operasional** bertugas memantau kinerja operasional dari Danamon dan anak-anak perusahaannya, hasil-hasil indikator kinerja utama dan kecenderungannya serta insiden-insiden yang signifikan. Komite ini diketuai oleh Direktur Utama.

**Komite Risiko** menetapkan kebijakan pengelolaan risiko, strategi dan tingkat toleransi risiko Bank dan anak perusahaannya; serta kebijakan kredit, strategi kredit dan limit kredit Bank dan anak perusahaannya, menetapkan batasan pada peminjam, industri dan segmen pasar tertentu. Komite ini dikepalai oleh *Integrated Risk Director*.

**Komite Teknologi Informasi** secara periodik melakukan kajian atas strategi, cetak biru dan prioritas TI di Danamon dan anak perusahaannya. Komite dikepalai oleh *Chief Technology Officer* Danamon.

**Komite Eksekutif Bisnis** diketuai oleh *Chief Financial Officer* dan antara lain bertanggung jawab memantau kinerja bisnis dan keuangan Grup.

**Komite Sumber Daya Manusia** terutama bertugas menetapkan arahan strategis dan kebijakan penting di bidang sumber daya manusia. Komite Sumber Daya Manusia diketuai oleh Wakil Direktur Utama.

**Komite Asset and Liability Management (ALCO)** memformulasikan kebijakan dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva Bank sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan risiko dan ketentuan yang berlaku. Fokus ALCO adalah memastikan bahwa Bank senantiasa memiliki likuiditas dan modal yang cukup untuk mendukung operasi dan pengembangan bidang-bidang usaha Bank. Komite terdiri dari *Head of Treasury & Capital Markets* serta manajemen senior lainnya.

### **Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah melakukan supervisi atas aktivitas Perbankan Syariah. Anggota Dewan bertindak sebagai penasehat dan konsultan bagi Direksi, Kepala Unit Usaha Syariah dan Manajer Umum Kantor Cabang Syariah dalam segala hal yang menyangkut produk dan layanan perbankan Syariah. Dewan ini independen, dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Nasional (DSN), yaitu lembaga yang beroperasi di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ditempatkan pada bank yang menyediakan layanan perbankan berdasarkan prinsip Syariah, dengan ketentuan dan peraturan khusus yang dibuat oleh DSN.

Dewan Pengawas Syariah dibentuk pada tanggal 1 Februari 2002 dan terdiri dari:

**Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin** (Ketua)

**Drs. Hasanudin, M. Ag** (Anggota)

**Ir. H. Adiwarman A. Karim, SE, MBA** (Anggota)

### **Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)**

SKAI merupakan sebuah fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Tugas utamanya adalah untuk menyampaikan temuan yang independen dan obyektif serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan operasional Bank. Pendekatan SKAI yang sistematis membantu Danamon dalam mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas proses-proses manajemen risiko, pengawasan dan tata kelola perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI bekerjasama dengan bagian Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Pengendalian Keuangan. SKAI juga bekerjasama dengan Auditor Eksternal dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak dan koordinasi upaya-upaya audit.

SKAI mencakup semua lini usaha, kelompok produk dan fungsi pendukung di Kantor Pusat, kantor wilayah dan kantor cabang. Terdapat tujuh kepala audit wilayah yang semuanya melapor langsung ke SKAI Kantor Pusat.

SKAI memiliki akses tidak terbatas terhadap semua fungsi, catatan, properti dan karyawan Bank serta anak perusahaan (berdasarkan Anggaran Dasar SKAI yang disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris). SKAI telah memenuhi standar BI untuk implementasi Fungsi SKAI (SPFAIB) sesuai dengan Peraturan BI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 dan *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* dari The Institute of Internal Auditors.

Hasil audit didistribusikan dalam laporan audit kepada semua pihak terkait termasuk Direktur Utama, *Integrated Risk Director* dan Direktur Kepatuhan. Setiap bulan, ringkasan semua pokok permasalahan audit dipresentasikan kepada Komite Operasional dan Komite Audit pada kesempatan yang terpisah untuk didiskusikan secara konstruktif. SKAI juga menyelenggarakan pertemuan berkala setiap bulan dengan Komite Audit.

Guna meningkatkan kualitas auditnya, di tahun 2007, SKAI mengimplementasikan dua metodologi audit baru sebagai berikut:

1. **Pendekatan Audit Terintegrasi** (untuk entitas audit utama di Kantor Pusat)  
Tim audit khusus (Audit Kredit, Audit Produk, *Audit Support*) secara terintegrasi bersama Audit TI melakukan kajian audit pada platform audit berdasarkan risiko untuk mengaudit entitas audit utama di Kantor Pusat. Penyempurnaan metodologi audit ini memungkinkan penelaahan yang lebih komprehensif atas proses-proses kritis yang diaudit oleh Tim audit integrasi.
2. **Pengawasan Kontrol Proses** (untuk entitas audit Danamon Simpan Pinjam)  
Lingkup kajian mencakup efektivitas dari Kontrol Kredit dan Kontrol Operasi. Pengawasan Kontrol Proses (*Cluster Audit Approach*) telah memberikan beberapa manfaat, seperti fungsi kontrol yang lebih baik serta pengawasan kesesuaian kontrol dari setiap Cluster.

#### Aktivitas Audit Internal Tahun 2006-2007

Fokus Audit	2007	2006
Kantor Pusat (termasuk Adira Grup)	71	84
Cabang-cabang Konvensional	186	279
Proses dan Layanan Regional	25	15
SEMM – <i>Cluster</i>	113	344
CMM – <i>Credit Processing Center</i>	15	38
Syariah	9	8
<b>Total</b>	<b>419</b>	<b>768</b>

#### Komunikasi dengan Stakeholder

##### Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan juga bertindak sebagai Direktur Kepatuhan yang bertanggung jawab atas penyebaran dan pengungkapan semua informasi yang berkenaan dengan kinerja Bank secara tepat waktu, akurat dan transparan, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank sebagai perusahaan publik.

Sekretaris Perusahaan memainkan peranan penting dalam membantu Bank memenuhi peraturan pasar modal dengan menyediakan pedoman bagi Komisaris dan Direksi mengenai masalah-masalah seperti tata kelola perusahaan, Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab dalam memastikan kualitas dan akurasi dari informasi dan nasehat yang diberikan kepada Komisaris dan Direksi mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencapai standar tertinggi dalam pengelolaan rapat pemegang saham, Komisaris dan Direksi.

##### Hubungan Investor

Misi utama Hubungan Investor (IR) adalah mengupayakan komunikasi yang berkelanjutan dan semakin baik dengan investor. Sepanjang tahun 2007, Danamon aktif menyelenggarakan diskusi dan pertukaran informasi dengan pemegang saham, komunitas lembaga investasi dan komunitas pialang saham. Berbagai acara komunikasi diselenggarakan, diantaranya pertemuan resmi kelompok atau perorangan, konferensi investasi, telekonferensi, internet dan publikasi laporan keuangan serta penyampaian peristiwa material secara tepat waktu melalui siaran pers, buletin dan situs internet perusahaan.

#### Aktivitas Penyebarluasan Informasi

Jumlah Kegiatan	2007	2006
Paparan Publik	4 kali	4 kali
<i>Non Deal Roadshows</i>	20 hari	13 hari
Kunjungan Perusahaan/Rapat	85 kali	35 kali

## Hubungan Masyarakat

Hubungan Bank dengan para pemangku kepentingan internal dan eksternal juga dikelola melalui Divisi Public Affairs. Divisi ini mengelola portal internet yang menyediakan informasi kepada karyawan mengenai fasilitas dan tunjangan kesejahteraan karyawan serta informasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan sehari-hari.

Informasi kepada pihak eksternal disampaikan melalui situs: [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id) dan divisi ini menjalankan aktivitas untuk membangun serta mempertahankan hubungan dengan media melalui lokakarya, konferensi, diskusi dan kunjungan media. Divisi ini juga memberikan dukungan dan koordinasi dalam pelaksanaan acara-acara internal dan eksternal serta menyediakan panduan *corporate branding*.

## Kepatuhan pada Peraturan

Perihal	Status	Catatan
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	memenuhi ketentuan	CAR Danamon per tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar 19,3% (dengan memperhitungkan risiko pasar), melebihi persyaratan minimum yang diterapkan oleh Bank Indonesia sebesar 8%.
Giro Wajib Minimum (Minimum Reserve Requirements)	memenuhi ketentuan	Giro Wajib Minimum (Rupiah) Danamon sebesar 8,29%.
Kredit Bermasalah (NPL)	memenuhi ketentuan	Rasio NPL gross per 31 Desember 2007 sebesar 2,27%. NPL bersih adalah 0%.
Posisi Devisa Netto (NOP)	memenuhi ketentuan	NOP per 31 Desember 2007 sebesar 1,64% dibandingkan dengan peraturan Bank Indonesia maksimum sebesar 20% dari ekuitas.
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	memenuhi ketentuan	Per 31 Desember 2007 tidak terdapat pinjaman individu atau grup yang tidak sesuai dengan persyaratan BMPK dari Bank Indonesia.
Anti Pencucian uang (Money Laundering)	memenuhi ketentuan	Danamon telah mematuhi sepenuhnya undang-undang anti <i>money laundering</i> dan peraturan Bank Indonesia. Pelatihan khusus diselenggarakan untuk memastikan bahwa semua unit bisnis dan unit pendukung memperoleh informasi yang memadai dan terlatih untuk melakukan pencegahan dan pengenalan terhadap upaya pencucian uang.

## Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Melalui yayasan sosial Danamon Peduli, Danamon terus berperan aktif dalam berbagai aktivitas pengembangan komunitas. Penjelasan lengkap dari tanggung jawab sosial Bank dapat dilihat di bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari Laporan Tahunan ini.

## Informasi Tata Kelola Perusahaan Material Lainnya

### Kebijakan Investasi

Danamon telah menerapkan kebijakan investasi yang mengatur aktivitas investasi pribadi karyawan. Salah satu isi kebijakan tersebut adalah adanya periode untuk tidak boleh memperdagangkan (*black out period*) surat berharga yang diterbitkan Bank selama 10 hari kerja sebelum, dan dua hari kerja sesudah, laporan keuangan Bank dipublikasikan kepada publik.

## Kebijakan Transaksi Pihak Terkait

Danamon menerapkan kebijakan transaksi pihak terkait sebagai pedoman dalam melakukan transaksi dengan pihak terkait. Kebijakan ini dibuat untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara wajar dan berdasarkan pada ketentuan komersial dan pasar yang berlaku. Semua transaksi Bank dengan pihak terkait dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan, yang kemudian mengevaluasi dan melakukan pengujian kepatuhan terhadap transaksi tersebut, sebelum meminta persetujuan Komisaris.

## Kebijakan Penanganan Informasi Rahasia Milik Perusahaan

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, karyawan menerima dan berurusan dengan informasi, yang apabila digunakan secara tidak benar atau

dipublikasikan, dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan risiko yang merugikan bagi Danamon. Kebijakan penanganan informasi rahasia milik perusahaan dibuat untuk mencegah risiko ini dan menekankan pada cara karyawan menangani informasi non-publik milik perusahaan. Kebijakan ini berlaku bagi karyawan Danamon dan anak-anak perusahaannya.

## Menyelaraskan Kepentingan Karyawan dan Pemegang Saham

Seiring dengan makin kompetitifnya industri perbankan di Indonesia, maka untuk mendukung pertumbuhannya, banyak bank secara agresif merekrut talenta terbaik yang ada. Agar dapat memperoleh dan mempertahankan karyawan terbaiknya, Danamon telah mengimplementasikan rencana retensi finansial (*financial retention plan*) yang tidak hanya meningkatkan komitmen jangka panjang karyawan,

tetapi juga menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajemen.

Rencana Kompensasi Jangka Panjang (LTCP) diluncurkan tahun 2007 bagi Direksi dan karyawan sebagai bagian dari strategi retensi karyawan untuk menggantikan program *Employees Management Stock Option Plan* (MESOP) yang telah diluncurkan tahun 2004 dan berakhir di 2006. Sasaran utamanya adalah mempertahankan karyawan yang memberikan kontribusi penting bagi keberhasilan dan kelangsungan pertumbuhan Danamon melalui penyesuaian kompensasi karyawan individu dengan kinerja Bank.

LTCP terdiri atas pembayaran tunai yang ditahan (*cash-based deferred payment*) selama jangka waktu tiga tahun. Kompensasi LTCP ini dihitung berdasarkan parameter tingkat korporasi yaitu ROE dan laba bersih setelah pajak, serta parameter perorangan, yakni hasil Evaluasi Kinerja. Struktur pembayaran kompensasi dikaitkan dengan target laba bersih dan Indeks Harga Saham. Pemilihan kriteria dan sasaran untuk masing-masing individu ditentukan berdasarkan tingkat, kinerja/matriks potensial yang sangat penting bagi organisasi.

### Kasus Litigasi

Berikut ini adalah kasus-kasus litigasi dimana Danamon sebagai tergugat dan sudah selesai di tahun 2007.

### Kasus-kasus Litigasi

Penggugat	Jumlah Klaim	Kasus
PT Dharmapala Usaha Sukses	Rp 208 miliar	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Dharmapala Usaha Sukses (DUS) mendaftarkan gugatan balik pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunda eksekusi jaminan kredit, untuk merestrukturisasi kredit dan menggugat kerugian material sebesar Rp 108 miliar dan kerugian non-material sebesar Rp 100 miliar. Per 8 Maret 2007, Pengadilan Negeri memutuskan Danamon dapat melanjutkan eksekusi atas jaminan kredit DUS.</li> <li>Gugatan balik tersebut diajukan setelah Bank meminta pengadilan mengeksekusi jaminan kredit DUS yang telah gagal bayar berdasarkan perjanjian kredit. Pokok kredit sebesar Rp 165 miliar dan tunggakan bunga Rp 55 miliar, dimana untuk jumlah tersebut telah dilakukan pencadangan kerugian sepenuhnya.</li> <li>Kasus telah ditutup dan kedua pihak telah memasuki perjanjian kesepakatan pada 27 November 2007. Bank telah menerima pembayarannya dan kedua pihak telah menarik kembali seluruh kasus hukumnya.</li> </ul>
Ny. Purna Omsa Hutagalung	Rp 22 miliar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perselisihan mengenai kepemilikan sah atas aset Bank di cabang Bogor oleh Ny. Purna Omsa Hutagalung.</li> <li>Bank memenangkan kasus ini di tingkat Pengadilan Tinggi dan per 31 Desember 2006 kasus ini sedang ditangani oleh Mahkamah Agung.</li> <li>Kasus telah ditutup dengan dicapainya kesepakatan damai tanggal 22 Agustus 2007. Bank memberi kompensasi kepada pihak penggugat sebesar Rp 5 miliar dan penggugat telah menarik kasus hukumnya.</li> </ul>
Tansri Benui	Rp 4,7 miliar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tansri Benui mendaftarkan gugatan balik terhadap Bank atas eksekusi jaminan kreditnya. Berdasarkan perjanjian kredit, yang bersangkutan telah gagal bayar. Gugatan diajukan terhadap Bank sebagai konsekuensi <i>merger</i> antara Bank dengan PT Bank Tiara.</li> <li>Per 31 Desember 2006 kasus ini ditangani Mahkamah Agung.</li> <li>Danamon telah memenangkan kasus tersebut di Mahkamah Agung pada tanggal 27 April 2007.</li> </ul>
Vannessa	Rp 1,2 miliar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggugat mendaftarkan gugatan sehubungan dengan eksekusi jaminan penggugat oleh Bank melalui lelang.</li> <li>Kasus telah ditutup dan penggugat telah mencabut tuntutan hukumnya.</li> </ul>



## Ikhtisar Kasus Litigasi yang masih berjalan per 31 Desember 2007

Penggugat	Jumlah Klaim	Kasus
Petani Plasma	Rp 650 miliar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beberapa anggota Koperasi KUD Karya Makmur mendaftarkan tuntutan atas PT Bangun Nusa Lampung (PT BNIL), PT KUD dan PT Bank Danamon sehubungan dengan kerugian akibat gagal bayar dari KUD dan penahanan jaminan tanah oleh Danamon. Kasus ini berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit ke KKPA (Kredit Koperasi Kepada Anggota) di mana Danamon berperan sebagai kreditor dan PT Bangun Nusa Lampung sebagai penjamin.</li> <li>Bank dengan para tergugat lainnya telah memenangkan tuntutan di tingkat Pengadilan Negeri dan penggugat telah mengajukan kasusnya ke Pengadilan Tinggi Lampung.</li> <li>Selain itu, kasus kedua telah didaftarkan oleh sebagian dari penggugat di atas berkaitan dengan hal yang sama. Total klaim dari kasus kedua adalah Rp 74 miliar.</li> </ul>
PT Cendrawasih Kencana Tour & Travel Service Pekanbaru	Rp 191 miliar	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Cendrawasih Kencana mendaftarkan tuntutan terhadap Danamon atas pembayaran giro yang ditahan.</li> <li>Bank telah memenangkan kasus di semua tingkat pengadilan termasuk di tingkat Mahkamah Agung. Penggugat mendaftarkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.</li> </ul>
PT Triojaya Indah Andalas	Rp 8,7 miliar	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Triojaya Indah Andalas mendaftarkan tuntutan hukum terhadap Bank atas tindakan yang tidak mematuhi hukum karena menolak melaksanakan perintah transfer dana.</li> <li>Bank mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Padang dan dinyatakan kalah. Kasus ini saat ini sedang diajukan ke Mahkamah Agung.</li> </ul>
Koperasi Taxi Indonesia	Rp 5,1 miliar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koperasi Taxi Indonesia mendaftarkan tuntutan hukum terhadap Bank karena tidak membayar simpanan mereka. Gugatan diajukan sebagai akibat dari merger antara Bank dengan PT Bank Nusa Nasional (BNN).</li> <li>Bank memenangkan kasus ini di tingkat Pengadilan Negeri.</li> <li>Koperasi Taxi Indonesia mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta.</li> <li>Pengadilan Tinggi belum memberikan keputusan akhirnya.</li> </ul>
Sri Krisnawati	Rp 4,5 miliar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ibu Sri Krisnawati mendaftarkan tuntutan hukum terhadap Bank akibat kerugian investasi dari reksadana yang dikelola oleh PT Platinum Investment.</li> <li>Kasus ini saat ini sedang dalam proses di Pengadilan Negeri Bandung.</li> </ul>

## Kepemilikan Saham Para Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Per 31 Desember 2007, total kepemilikan saham oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak melebihi 0,07% dari saham biasa Danamon.

## Kepemilikan Saham

Nama Pemilik Saham	Jumlah Saham	Persentase dari Saham yang Diterbitkan
Ng Khee Choe	50.000	0,0010%
Sebastian Paredes	477.000	0,0095%
Muliadi Rahardja	2.114.000	0,0420%
Anika Faisal	812.200	0,0161%

## Peringkat Kredit

Lembaga Pemeringkat	Peringkat / Outlook	
<b>Standard &amp; Poor's</b>	Long-term / Short-term Local Currency	BB- / Stable / B
	Long-term / Short-term Foreign Currency	BB- / Stable / B
	Subordinated Debt	B / Stable
<b>Moody's</b>	Global Local Currency Deposit	Baa3 / Stable
	Foreign Currency Long-term / Short-term Bank Deposit	B1 / Stable / Not Prime
	Subordinated Debt	Ba2 / Stable
	National Scale Rating	Aaa.id
<b>Fitch Ratings</b>	Long-term / Short-term Foreign Currency	BB- / Positive / B
	National Long-term	AA (idn) / Stable
<b>PEFINDO</b>	Corporate Rating	idAA- / Stable
	Bond Rating	idAA- / Stable

### Pemeringkatan Kredit

Danamon mendapat peringkat kredit dari perusahaan pemeringkat nasional dan internasional. Tabel di atas adalah peringkat kredit Danamon per 31 Desember 2007.

### Risiko

Sebagai bank komersial, Danamon menghadapi berbagai jenis risiko dan harus melakukan berbagai aktivitas untuk memonitor dan memitigasi risiko-risiko tersebut. Rincian aktivitas yang dilakukan Danamon guna memitigasi risiko dapat dilihat pada Catatan 44-45 dari laporan keuangan konsolidasi Danamon.

### Kejadian-kejadian Setelah Tanggal Pelaporan

Pada tanggal 25 Februari 2008, Danamon mengumumkan bahwa pemegang saham mayoritas, Fullerton Financial Holding Pte. Ltd. (FFH), telah menginformasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi bahwa setelah melakukan evaluasi menyeluruh, memutuskan untuk tidak melakukan penggabungan Danamon dengan Bank Internasional Indonesia (BII) seperti pernyataan sebelumnya dalam rencana penyesuaian struktur kepemilikan FFH sejalan dengan Kebijakan Kepemilikan Tunggal dari Bank Indonesia.

Dengan opsi penjualan sahamnya di BII, FFH hanya akan menjadi pemegang saham pengendali di Danamon. FFH berencana untuk menyelesaikan transaksi penjualan saham di atas sebelum tenggat waktu bulan Desember 2010 seperti yang disyaratkan dalam Kebijakan Kepemilikan Tunggal.

Laporan lengkap mengenai Tata Kelola Perusahaan Danamon dapat diakses melalui [www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id).